



Analisis Wacana tentang Pemberitaan Penolakan Revisi UU Pilkada 2024 pada Media Online Kompas.com

Bagus Prasetyo Suwandi¹, Irwan Dwi Arianto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: bagusprasetyosuwandi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-06 Keywords: <i>Discourse Analysis;</i> <i>Kompas.com;</i> <i>UU Pilkada Revision;</i> <i>Teun A. Van Dijk;</i> <i>Democracy.</i>	This research aims to analyze how the online media <i>Kompas.com</i> constructs discourse in reporting the rejection of the 2024 Regional Election Law (UU Pilkada) revision. Through media coverage, the issue shapes public perceptions of political processes and the legitimacy of power. This study employs a qualitative approach using the Teun A. Dijk discourse analysis model. The findings indicate that <i>Kompas.com</i> presents the news in a neutral and balanced manner. On a macro-structural level, the news supports democratic values and the rule of law, while on the micro-structural level, the language used emphasizes rationality and objectivity. <i>Kompas.com</i> tends to use neutral and factual language in reporting on the rejection of the 2024 Regional Election Law revision. Its word choice and sentence structure demonstrate the media's efforts to maintain journalistic professionalism without explicitly siding with the government or groups opposing the revision.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-06 Kata kunci: <i>Analisis Wacana;</i> <i>Kompas.com;</i> <i>Revisi UU Pilkada;</i> <i>Teun A. Van Dijk;</i> <i>Demokrasi.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online <i>Kompas.com</i> membangun wacana pemberitaan mengenai penolakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tahun 2024. Melalui pemberitaan di media, isu ini membentuk persepsi publik terhadap proses politik dan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa <i>Kompas.com</i> menyajikan pemberitaan dengan kecenderungan netral. Struktur makro berita mengarah pada penguatan nilai demokrasi dan penegakan hukum, sedangkan pada tingkat mikro ditemukan penggunaan bahasa yang menekankan rasionalitas dan objektivitas. <i>Kompas.com</i> dalam memberitakan isu penolakan revisi UU Pilkada 2024 cenderung menggunakan bahasa yang netral dan faktual. Pemilihan kata dan struktur kalimat menunjukkan upaya media ini untuk tetap menjaga profesionalitas jurnalistik tanpa memihak secara eksplisit pada pihak pemerintah ataupun kelompok penentang revisi.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi, terutama di sektor komunikasi, telah membawa masyarakat Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh komunikasi yang efisien dan penuh dinamika. Mirip dengan ucapan lisan dan sinyal nonverbal, media massa kini menjadi elemen integral dalam interaksi manusia. Kompas.com, yang awalnya dikenal sebagai Kompas Online, didirikan pada 14 September 1995 dan menjadi salah satu pionir dalam bidang media digital di Indonesia (Khotimah, 2024). Pada 29 Mei 2008, platform tersebut melakukan rebranding menjadi Kompas.com (Kurnia et al., 2021). Melalui rebranding ini, Kompas.com bertujuan untuk menegaskan posisinya sebagai rujukan utama bagi praktik jurnalisme yang berkualitas di hadapan pembaca.

Situs web berita yang menyediakan pembaruan harian merupakan contoh sumber informasi yang modern dan mudah diakses

(Fianto et al., 2023). Media massa memiliki dampak yang sangat besar terhadap perubahan sikap, opini, dan perilaku komunikasi. Dalam konteks pembahasan revisi UU Pilkada, misalnya, beberapa media mungkin mendukung langkah revisi dengan menonjolkan argumen efisiensi dan stabilitas politik, sementara yang lain menekankan dampaknya terhadap hak partisipasi rakyat.

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu menjadi isu yang sarat dengan muatan politik dan sosial. Setelah pelaksanaan pemilihan langsung sejak reformasi, muncul wacana revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengembalikan sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks komunikasi, revisi UU Pilkada ini merupakan peristiwa penting yang memicu diskursus publik secara luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut mempercepat dan memperluas penyebaran isu

ini. Konten berita, opini, dan diskusi yang berkembang di media-media tersebut memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap revisi ini.

Revisi UU Pilkada memicu polemik yang kompleks di tengah masyarakat, terutama karena menyentuh hak rakyat dalam berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan pemimpin (Nugraha & Mulyandari, 2016). Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap revisi UU Pilkada, baik dengan mengangkat sisi positif dari revisi maupun dengan menyoroti potensi dampak negatifnya terhadap demokrasi. Berbagai media memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam pemberitaan terkait isu ini. Dalam menjalankan riset ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan cara menganalisis data dari media online *kompas.com*. Dengan mengumpulkan sudut pandang yang berbeda, diharapkan gambaran yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan mengenai dinamika politik di tingkat lokal.

Pemberitaan pada surat kabar *online* yang diterbitkan oleh *Kompas.com* tersebut menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan analisis dengan menggunakan teori Teun A. Van Dijk. Analisis wacana dengan menggunakan teori Teun A. van Dijk dalam penelitian ini memfokuskan pada dimensi teks dan konteks sosial. Dimensi teks terdiri atas struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro berkaitan dengan makna keseluruhan yang dapat dipahami dari tema atau topik yang dibahas dalam suatu wacana. Superstruktur menunjuk pada struktur yang membentuk suatu wacana, seperti kelaziman tulisan yang diawali dengan pendahuluan, isi/pokok bahasan, dan penutup. Sementara itu, struktur mikro merujuk pada makna wacana yang dapat dilihat dari aspek semantik, sintaksis, dan grafis. Konteks sosial berkaitan dengan hubungan teks wacana dengan faktor-faktor sosial yang menjadi latar belakang mengapa suatu teks tersebut diproduksi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna, ideologi, serta pesan yang terkandung dalam teks berita. Penelitian ini dilakukan pada media *online Kompas.com*, dengan fokus pada rubrik politik nasional yang memuat

berita-berita mengenai penolakan terhadap Revisi UU Pilkada 2024. Berita yang berkaitan dengan penolakan Revisi UU Pilkada 2024 yang dipublikasikan di *Kompas.com* selama periode 21 Agustus hingga 30 September 2024. Pemilihan berita didasarkan pada **relevansi isi** dengan topik penelitian, tanpa melibatkan kegiatan wawancara maupun observasi lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis wacana Teun A. Van Dijk untuk mengkaji dan memahami bagaimana konstruksi teks, kognisi pengarang, serta konteks sosial membentuk makna dalam pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di *Kompas.com*. Analisis data dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama dalam model Van Dijk, yaitu:

1. Struktur Teks (Text Structure)

Menganalisis unsur-unsur internal teks berita yang mencakup:

- a) Struktur Makro (Tematik): Menelaah tema utama atau topik pokok yang diangkat dalam teks.
- b) Superstruktur (Skematik): Menganalisis alur penyusunan berita, seperti pendahuluan, isi, dan penutup.

Struktur Mikro: Menganalisis aspek semantik (makna), sintaksis (struktur kalimat), stilistik (gaya bahasa), dan retorik (cara penekanan makna).

2. Kognisi Sosial (Social Cognition)

Dimensi ini mengkaji bagaimana wartawan, redaktur, dan institusi media *Kompas.com* memahami dan memaknai isu revisi UU Pilkada. Analisis ini melibatkan interpretasi terhadap latar belakang sosial, pengalaman, dan ideologi yang mempengaruhi penyusunan teks berita.

3. Konteks Sosial (Social Context)

Menganalisis kondisi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi kemunculan teks berita. Misalnya, dinamika politik antara DPR dan MK, peran masyarakat sipil, serta perdebatan publik terkait demokrasi dan otonomi daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Teks Berita 1 “Revisi UU Pilkada tak Sesuai Putusan MK Memperumit Penyelenggara Pilkada 2024”

Struktur wacana	Elemen	Hasil Analisis
Struktur Makro	Topik	Fokus berita pada revisi UU Pilkada oleh DPR yang dinilai tidak sejalan dengan putusan MK, menimbulkan potensi sengketa hasil Pilkada dan peningkatan biaya politik.
Superstruktur (Skematik)	Skema	Revisi UU Pilkada berpotensi mempersulit penyelenggara Pilkada 2024. Pandangan pakar Charles Simabura menilai revisi DPR bertentangan dengan putusan MK dan tetap mempertahankan ambang batas pencalonan. MK menegaskan putusannya final dan mengikat.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Latar muncul dari perdebatan politik hukum antara DPR dan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.
	Detail	Menjelaskan proses revisi Pasal 40 UU Pilkada oleh Panja Baleg DPR dalam waktu singkat dan kutipan putusan MK sebagai penguat argumentasi.
Struktur Mikro (Sintaksis)	Maksud	Menunjukkan bahwa indakan DPR bertentangan dengan konstitusi dan dapat menimbulkan kekacauan hukum serta biaya politik tinggi.
	Bentuk Kalimat	Menggunakan kalimat aktif yang menegaskan revisi UU sebagai penyebab utama persoalan.
Struktur Mikro (Retoris)	Koherensi	Menggunakan konjungsi “sebab”, “padahal”, dan “dengan demikian” untuk menegaskan hubungan sebab-akibat dan argumentasi antarbagian berita.
	Grafis	Ilustrasi foto Gedung DPR atau sidang MK memperkuat konteks hukum dan politik, menegaskan keseriusan isu revisi UU Pilkada.

Tabel 2. Berita 2 “UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Atur Domisili Calon Kepala Daerah

Struktur wacana	Elemen	Hasil Analisis
Struktur Makro	Topik	Berita membahas gugatan mahasiswa FH UI, Abu Rizal Biladina, terhadap UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dinilai tidak mengatur unsur lokalitas calon kepala daerah, dengan tujuan agar pemimpin daerah memahami karakter wilayahnya.
Superstruktur (Skematik)	Skema	Gugatan terhadap UU Pilkada oleh mahasiswa UI karena tidak mencantumkan unsur lokalitas calon kepala daerah. Alasan gugatan karena kepala daerah non-lokal sering tidak memahami nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. MK memberi waktu 14 hari bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonan.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Situasi menjelang Pilkada 2024 dengan munculnya kritik terhadap minimnya syarat lokalitas bagi calon kepala daerah dalam UU Pilkada.
	Detail	Memuat isi gugatan tentang penambahan syarat domisili minimal 5 tahun, disertai argumen dampak negatif kepala daerah non-lokal dan tanggapan MK.
Struktur Mikro (Sintaksis)	Maksud	Menginformasikan adanya upaya hukum masyarakat untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dan kearifan lokal dalam regulasi Pilkada, sekaligus menyoroti pentingnya representasi daerah.
	Bentuk Kalimat	Menggunakan kalimat formal dan informatif dengan kombinasi kutipan langsung Pemohon dan Hakim MK. Gaya penulisan netral dan argumentatif sesuai karakter berita hukum-politik.
Struktur Mikro (Retoris)	Koherensi	Alur kronologis dan argumentatif: dimulai dari gugatan, alasan hukum, contoh kasus, tanggapan MK, hingga tindak lanjut. Kohesi dijaga dengan penghubung seperti “karena”, “sehingga”, dan “dalam permohonannya”.

Struktur Mikro (Retoris)	Grafis	Judul bersifat informatif dan langsung menyoroti inti isu hukum. Paragraf singkat dan kutipan langsung memperkuat kredibilitas. Disertai foto Gedung MK sebagai ilustrasi visual yang menegaskan konteks hukum, serta tautan artikel terkait untuk memperluas pemahaman isu.	Mikro (Retoris)	kapital pada nama lembaga resmi menegaskan keformalan; kutipan langsung memperkuat objektivitas; paragraf ringkas tanpa gambar menonjolkan fakta hukum
--------------------------	--------	--	-----------------	--

Tabel 3. Berita 3 “UU Pilkada Digugat, Pemohon Minta Pendidikan Calon Kepala Daerah Minimal Sarjana”

Struktur wacana	Elemen	Hasil Analisis
Struktur Makro	Topik	Gugatan terhadap UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyoroti syarat pendidikan calon kepala daerah agar diubah dari minimal SLTA menjadi sarjana.
Superstruktur (Skematik)	Skema	Menyampaikan adanya gugatan oleh warga bernama Zulferinanda. Alasan gugatan terkait kesenjangan usia dan tingkat pendidikan calon. Pemimpin daerah perlu berpendidikan sarjana agar memiliki kapasitas strategis. Hakim MK Arief Hidayat menanggapi dan meminta klarifikasi perbedaan dengan gugatan sebelumnya.
Struktur Mikro (Semantik)	Latar	Hakim MK Arief Hidayat menanggapi dan meminta klarifikasi perbedaan dengan gugatan sebelumnya
	Detail	Menyebut pasal 7 ayat (2) huruf c dan e, serta memuat argumen pemohon dan tanggapan MK.
Struktur Mikro (Sintaksis)	Maksud	Menginformasikan dinamika hukum dan demokrasi terkait peningkatan kualitas calon kepala daerah.
	Bentuk Kalimat	Kalimat informatif dan deklaratif; menggunakan kutipan langsung dari pemohon dan hakim MK.
	Koherensi	Alur logis dijaga dengan konjungsi seperti “menurut pemohon”, “karena”, “padahal”, dan “untuk itu”.
Struktur	Grafis	Penggunaan huruf

1. Analisis Kognisi Sosial

Kognisi sosial berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemikiran dan pemahaman seorang pengarang tentang suatu peristiwa diinterpretasikan. Hal ini karena produksi wacana melibatkan proses yang dikenal sebagai kognisi sosial (Azhara et al., 2023). Dalam konteks pemberitaan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024, kognisi sosial wartawan *Kompas.com* tampak melalui cara mereka menempatkan isu ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan politik yang dianggap mengancam demokrasi daerah. Wartawan berupaya memahami dinamika protes dan penolakan publik bukan sekadar sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai cerminan kesadaran sosial masyarakat yang menolak sentralisasi kekuasaan dalam proses pemilihan kepala daerah. Melalui berita yang disusun, wartawan berusaha memperlihatkan kepada pembaca bahwa polemik revisi UU ini bukan hanya perdebatan hukum, melainkan juga persoalan legitimasi kekuasaan dan representasi rakyat di daerah.

2. Strategi Dalam Memahami Peristiwa

Strategi dalam memahami peristiwa yang digunakan oleh wartawan *Kompas.com* menunjukkan adanya proses berpikir sistematis dalam membingkai isu revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Strategi ini dimulai dari pemahaman terhadap konteks hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan terhadap dampak sosial dan politik yang muncul dari isu tersebut. Selain itu, strategi pemahaman wartawan juga bersifat interpretatif. Mereka menafsirkan gugatan terhadap UU Pilkada sebagai bentuk refleksi sosial terhadap kepemimpinan daerah yang selama ini dinilai kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemberitaan menjadi sarana pembelajaran politik bagi publik untuk memahami pentingnya kriteria kepala daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan keterikatan sosial dengan daerah yang dipimpinnya.

3. Kognisi Penulis

a) Skema Person

Skema orang menggambarkan bagaimana komunikator mempersepsi dan menggambarkan orang lain (Kusniawati, 2023). Wartawan *Kompas.com* menggambarkan pemohon seperti Abu Rizal Biladina dan Zulferiananda sebagai individu yang berani menggunakan jalur hukum demi memperbaiki regulasi. Mereka diposisikan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang cerdas dan kritis terhadap sistem politik. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi ditampilkan sebagai institusi yang profesional dan berperan menjaga keadilan konstitusional di tengah dinamika politik nasional.

b) Skema Diri

Skema diri merupakan menggambarkan bagaimana komunikator menggambarkan dirinya dan para akun andil dalam menyampaikan suaranya (Kusniawati, 2023). Wartawan *Kompas.com* memandang diri mereka sebagai mediator informasi yang bertugas menjembatani pemahaman antara masyarakat dan lembaga negara. Mereka menyusun berita dengan berpegang pada prinsip objektivitas, akurasi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari pemilihan sumber yang seimbang dan penggunaan bahasa yang netral tanpa memihak pada pihak mana pun.

c) Skema Peran

Wartawan *Kompas.com* berperan sebagai fasilitator demokrasi, yang membantu masyarakat memahami kompleksitas persoalan hukum dan politik. Mereka juga berperan sebagai pengontrol sosial, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan tidak mengabaikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, kognisi penulis bekerja secara kritis, mendorong kesadaran bahwa perubahan undang-undang bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan juga bagian dari perjuangan kolektif memperkuat demokrasi daerah.

4. Analisis Konteks Sosial

a) Praktik Kekuasaan

Praktik kekuasaan dalam konteks pemberitaan revisi UU Pilkada mencerminkan dinamika relasi antara masyarakat sipil, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dominan dalam menentukan tafsir hukum terhadap konstitusi, sementara

masyarakat menggunakan haknya untuk menggugat melalui jalur hukum. Media, dalam hal ini *Kompas.com*, berperan sebagai kekuatan keempat (*fourth estate*) yang mengawasi dan mengontrol praktik kekuasaan agar tidak melampaui batas demokrasi. Melalui pemberitaan yang kritis, media turut mendistribusikan kekuasaan wacana kepada publik agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan negara.

b) Akses Mempengaruhi Wacana

Akses terhadap wacana dalam kasus ini terlihat dari siapa yang diberi ruang untuk berbicara dalam pemberitaan. *Kompas.com* memberikan akses besar kepada pemohon gugatan, hakim konstitusi, dan ahli hukum, sementara pandangan pemerintah atau DPR tidak terlalu dominan. Hal ini menunjukkan strategi media dalam mengalihkan pusat wacana dari penguasa kepada masyarakat sipil. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemohon dan kalangan akademisi, media memperluas akses partisipatif publik terhadap isu hukum dan politik. Secara tidak langsung, pemberitaan ini memperkuat demokratisasi wacana di ruang publik, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek informasi, tetapi juga subjek dalam proses pembentukan makna politik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kompas.com dalam memberitakan isu penolakan revisi UU Pilkada 2024 cenderung menggunakan bahasa yang netral dan faktual. Pemilihan kata dan struktur kalimat menunjukkan upaya media ini untuk tetap menjaga profesionalitas jurnalistik tanpa memihak secara eksplisit pada pihak pemerintah ataupun kelompok penentang revisi.

Melalui pendekatan analisis wacana model Teun A. Van Dijk, ditemukan bahwa struktur makro, superstruktur, dan mikro dalam teks berita *Kompas.com* memperlihatkan upaya media dalam membentuk persepsi publik terhadap isu revisi UU Pilkada. Media menekankan pentingnya supremasi hukum, peran Mahkamah Konstitusi, serta hak rakyat dalam proses demokrasi.

Pemberitaan yang disajikan cenderung memperlihatkan fungsi edukatif media, dengan menjelaskan latar belakang revisi, proses hukum yang berlangsung, serta

dampak potensial terhadap demokrasi lokal. Kompas.com berhasil menjaga relevansi isu ini dengan menampilkan berbagai sudut pandang tanpa menjatuhkan kredibilitas pihak manapun.

B. Saran

Bagi Media Online Kompas.com, diharapkan dapat terus mempertahankan prinsip jurnalisme independen dengan menampilkan informasi yang objektif, berimbang, dan akurat. Dalam isu politik sensitif seperti revisi UU Pilkada, media perlu memperkuat verifikasi data serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya agar tidak muncul kesan keberpihakan.

Bagi masyarakat pembaca media online, diharapkan agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Pembaca perlu memahami konteks dan latar belakang suatu kebijakan publik sebelum mengambil kesimpulan agar tidak mudah terpengaruh oleh framing tertentu yang muncul di media sosial atau media lain yang kurang kredibel.

DAFTAR RUJUKAN

- Azhara, A., Harmaen, D., & Nugraha, A. S. (2023). Kognisi Sosial Pada Novel Suti Karya Sapardi Djoko Damono Analisis Wacana Model Van Dijk. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 5742-5750. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1371>
- Fianto, L., Ghofur, M. A., & Qorib, F. (2023). Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach Dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.24853/jbk.1.2.2023.1-9>
- Khotimah, H. (2024). REPRESENTASI KETIDAKADILAN DALAM PEMBERITAAN GURU SUPRIYANI: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 6(4). <https://journalpedia.com/1/index.php/epi/index>
- Kurnia, F. A., Helmi, S. A., & Rochmana, S. D. (2021). Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 9(1), 29-38. <https://doi.org/10.30659/jikm.v9i1.13312>
- Kusniawati, G. (2023). Analysis Of The Use Of Hashtags As A Social Movement In Determining Public Opinion On Social Media" Twitter"(Study On Hastag# Sahkanruupks). *TABAYYUN*, 4(2), 357-371. <https://doi.org/10.19109/tabayyun.v4i2.19248>
- Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*, 208-236. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>